



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Korupsi Pembelian Tanah Diduga Rugikan Negara Rp 466 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan atau pembelian tanah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang diduga merugikan negara Rp466 miliar.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta yang berlangsung hingga Selasa (17/1) malam. Setidaknya, kata Ali, ada enam ruangan yang di-geledah di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi DPRD DKI Jakarta.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti pengadaan atau pembelian tanah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada 2019 lalu.

"Dari penggeledahan ini, tim penyidik mendapatkan beberapa dokumen dan juga alat bukti elektronik terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan persetujuan modal daerah (PMD) pada Perusahaan Umum Daerah SJ (Perumda Pembangunan Sarana Jaya) di DPRD DKI Jakarta, yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta," tegas Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Ali, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga penyelidikan yang dilakukan sebelumnya diputuskan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dia memastikan, di tahap penyidikan sudah tersangka yang telah ditetapkan dan temuan dugaan jumlah kerugian keuangan negara di Pemprov DKI Jakarta mencapai ratusan miliar.

Ali berusaha diplomatis saat di-singgung dugaan kerugian negara mencapai lebih Rp466 miliar pengadaan tanah di Pulogebang dari total penyertaan modal Rp1 triliun ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Ali tetap diplomatis kala di-singgung para tersangka dalam kasusnya, diantaranya termasuk pertidalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ronggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 2019 yang merugikan keuangan negara Rp152,5 miliar.

"Sejauh ini KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan tanah di Pulogebang tersebut sehingga kemudian diduga timbul kerugian keuangan negara. Diduga kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah," ungkap Ali.

Ali memastikan benar saat di-singgung bahwa ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan ruang kerja mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang telah dirotasi menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Mohamad Taufik turut di-geledah tim penyidik. Meski demikian, dia mengaku belum bisa menyampaikan secara spesifik apa saja barang bukti yang ditemukan dan disita tim penyidik dari ruang tersebut. Namun yang pasti kata dia, barang bukti yang disita akan dikonfirmasi saat pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi, termasuk nanti Prasetyo dan Taufik diperiksa.

"Kami belum bisa menyebutkan secara spesifik ruangan siapa dan ditemukan apa. Karena, sekali lagi pada gilirannya kami akan konfirmasi pada proses berikutnya. Sehingga, kalau kemudian kami sebutkan saat ini, khawatirnya nanti mengganggu proses penyidikan. Ketika seorang dipanggil sebagai saksi, sudah dijelaskan bahwa ada barang yang ditemukan disana saat penggeledahan," ujar Ali.

Disisilain, Ali belum mendapatkan informasi lanjutan dari penyidik ihwal rencana kapan pemeriksaan terhadap Prasetyo dan Taufik sebagai saksi. Dia menjelaskan, pemeriksaan saksi mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya, apakah seseorang yang dipanggil saksi itu penting, dapat menerangkan pengetahuannya, dan dapat menerangkan rangkaian dugaan perbuatan para tersangka yang telah ditetapkan. Artinya, penanggilan dan pemeriksaan saksi disesuaikan dengan kepentingan penyidik dan kebutuhan penyidikan. "Ke depan,

tim penyidik akan menganalisis dari hasil penggeledahan itu," bebernya.

Lebih jauh Ali menjelaskan, sebetulnya sudah ada beberapa saksi yang diperiksa penyidik KPK untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan/pembelian tanah di Pulogebang. Saksi-saksi itu diperiksa untuk menerangkan dugaan perbuatan dan rangkaian peristiwa untuk pengadaan tanah di Pulogebang.

Dikatakannya, penyidikan kasus dugaan ini bukan merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang merugikan keuangan negara Rp152,5 miliar dengan terpidana mantan direktur utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan dkk.

"Jadi bukan pengembangan dari perkara pengadaan tanah di Munjul sebenarnya, tapi (KPK) menemukan adanya fakta-fakta lain dugaan korupsi proses pengadaan tanah di tempat lain. Kalau yang pertama kan dari Munjul. Dari Munjul kemudian ditemukan ada fakta-fakta lain pengadaan di Pulogebang dan hampir mudahnya sama tetapi nilainya lebih besar untuk di Pulogebang. Tersangkanya pengadaan tanah di Pulogebang sudah ada, berapa jumlahnya, siapa saja, kontruksinya panalnya, itu kami akan amankan pada saatnya," tandas Ali.

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hal itu disampaikan Pras melalui akun Instagram miliknya. "Seperti pada tadi malam (17/1) KPK yang datang ke kantor DPRD DKI Jakarta untuk melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019," tulis Pras.

Dia mengatakan, KPK sebagai lembaga antirasuah pasti telah me-



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Korupsi Pembelian Tanah Diduga Rugikan Negara Rp 466 Miliar

miliki bukti-bukti permulaan sehingga melakukan penyelidikan tadi malam. Politikus PDI Perjuangan itu memastikan proses penganggaran di DPRD DKI dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. "Saya pun memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum," ujarnya. "Sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya selalu siap mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," titurnya.

Berbasis data dan dokumen yang diperoleh *KORAN SINDO*, pengadaan/pembelian tanah di Pulogebang menggunakan anggaran dengan skema penyertaan modal daerah (PMD) 2018-2019 dan APBD kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang telah disetujui DPRD DKI Jakarta hampir Rp1 triliun. PMD ini di antaranya diproyeksikan untuk pengadaan/pembelian tanah proyek hunian DP 0 Rapiah. Sebelumnya, Yoory Corneles Pinontoan selaku direktur utama sempat mengusulkan penambahan PMD Rp1.803.750.000.000 untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam rancangan APBD 2019.

Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang dipimpin Yoory Corneles Pinontoan melakukan pengadaan dan pembelian tanah untuk lahan seluas 41.876 M2 yang terletak di Jalan Sejajar Tol Sisi Timur, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakong, Jakarta Timur. Lahan ini dibeli dari PT Adonara Propertindo (AP) selaku penjual tanah. Jumlah yang dibayarkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ke PT AP se-

besar lebih Rp466 miliar, yang diduga sebagai kerugian keuangan negara di Pemprov DKI Jakarta.

Pembayarannya dilakukan dua tahap. Pertama, 22 Februari 2019 total Rp215.408.200.000 dibayarkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ke PT AP berdasarkan tujuh faktur. Selain itu, pada tanggal yang sama juga terjadi pelunasan Rp37,876 juta atas kelengkapan pokok pembayaran tanah (untuk PPN, BPHTB, PNH, Jasa AJB Notaris, penyelesaian dan pemecahan kewajiban PBB, hingga balik nama SHGB-SHGB atas lahan seluas 41.876 m2).

Kedua, 20 Desember 2019 total Rp250.627.860.000 dibayarkan Perumda Pembangunan Sarana ke PT AP berdasarkan enam akta jual beli (AJB) yang ditandatangani oleh Direktur PT AP Tommy Adnan selaku penjual dan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan selaku pembeli.

Ada beberapa dugaan penyimpangan dalam pengadaan/pembelian tanah di Pulogebang itu. Di antaranya diduga tanah yang dibelikan merupakan tanah sengketa dan tanah filetit atau PT AP bukan pemilik sebenarnya, pengadaan/pembelian tanah dilakukan pengesahan dan evaluasi balik atas objek tanah maupun pemilik sebenarnya. Proses pembayaran (dua kali pembayaran) atas tanah sertifikasi balik guna hanguman (SHGB) yang sama, waktu pembayaran tahap kedua dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, pemecahan keputihan dan pemecahan AJB, hingga uang Rp37,876 juta tidak digunakn sebagaimana mestinya.

sabir lalulu